

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan masih merupakan masalah yang dialami seluruh penjuru dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya melibatkan negara-negara dunia ketiga maupun negara –negara berkembang. Hal ini karena disamping istilah kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai hidupnya atau mencukupi hidupnya secara layak namun juga berkaitan dengan adanya ketimpangan diantara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah (Hudiyanto, 2014).

Kemiskinan dibagi menjadi 2, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relative. Kemiskinan absolut adalah ukuran kemiskinan yang pasti dan tidak terbatas ruang dan waktu. Sehingga ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan sandang. Jadi kemiskinan absolut bisa diterjemahkan dengan keadaan finansial seseorang. Kemiskinan ini terjadi pada daerah jawa dan ibu kota. Sedangkan kemiskinan relatif yaitu ukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan dan distribusi pengeluaran seseorang. Kemiskinan ini dapat diukur dengan perbandingan antar daerah. Kemiskinan relatif adalah ukuran kemiskinan yang terjadi pada daerah Indonesia timur dan sekitarnya.

Indonesia adalah negara berkembang yang mengalami masalah kemiskinan yang cukup pelik, kemiskinan memang masalah yang krusial yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, saat Indonesia dilanda oleh masalah kemiskinan seperti sekarang ini pemerintah justru memberikan perhatian utamanya lebih kepada daerah-daerah perkotaan yang dimana sektor industrinya sudah terbilang modern, sementara sektor pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana di pedesaan kurang memadai akibat dari gelontoran dana yang dimaksimalkan untuk sektor modern di perkotaan. Di sisi lain harga kebutuhan pokok yang terus meningkat sedangkan standar kebutuhan kebutuhan yang tak ada habisnya semakin memperkeruh situasi ekonomi, jumlah penduduk yang kian meningkat menyebabkan lahan pekerjaan semakin sempit dan berimplikasi pada pengangguran. Hal inilah yang memunculkan ketimpangan pada masyarakat, sehingga kemiskinan tidak bisa dikatakan sebagai permasalahan yang sepele. Sama halnya dengan pandangan ekonomi baru yang menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan GNP semata, namun juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Tabel 1.1
Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
1	Papua	911,33	28,54
2	Papua Barat	225,80	25,43
3	NTT	1149,92	22,19
4	Maluku	327,72	19,18
5	Gorontalo	203,19	17,72
6	Bengkulu	328,61	17,32
7	Aceh	848,44	16,73
8	NTB	804,44	16,48
9	Sulawesi Tengah	420,52	14,45
10	Lampung	1169,60	14,29
11	Sumatra Selatan	1101,19	13,54
12	D.I Yogyakarta	494,94	13,34
13	Jawa Tengah	4506,89	13,27
14	Sulawesi Tenggara	326,86	12,88
15	Jawa Timur	4703,30	12,05

Data diolah dari laporan social ekonomi BPS 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi termiskin ke-12 di Indonesia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah terkecil dibanding dengan provinsi lainnya, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²) yang terletak di pulau Jawa. Dari total populasi penduduk 3.720.912 jiwa yang tersebar dalam 5 Kabupaten/kota, angka dalam tabel diatas menunjukkan bahwa 13,34% diantaranya masuk dalam kategori penduduk miskin. Kemiskinan yang terjadi di D.I Yoogyakarta disinyalir terjadi akibat dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha produktif

meliputi keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal. Menariknya faktor pendidikan yang selama ini dianggap sebagai salah satu faktor jamak yang mempengaruhi pola pikir masyarakat memicu menguatnya tingkat kemiskinan seperti halnya kurang berlaku di DIY. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I Yogyakarta justru sangat tinggi dibanding provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Selain itu kemiskinan di DIY disebabkan oleh lesatan pertumbuhan sektor perekonomian yang cenderung padat modal namun dikuasai oleh investor tertentu.

Di Indonesia otonomi daerah sangat penting bagi daerah otonom untuk mengembangkan potensi daerahnya. Tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas desentralisasi sangat dibutuhkan oleh daerah otonom. Namun otonomi daerah ini hanya dipahami sebagai pelimpahan wewenang dari elite politik nasional kepada elite politik daerah, sehingga kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah ini digunakan secara sewenang-wenang oleh para elite politik daerah. Disisi lain otonomi daerah mengharapkan adanya peran dari masyarakat, yaitu mengikutsertakan masyarakat sebagai subyek dalam pengambilan keputusan, bukan sebaliknya, masyarakat yang menjadi obyek dari suatu kebijakan yang diambil oleh elite politik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada masing-masing provinsi memperjelas bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah.

Menurut Priyo Adi Nugroho (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta, didapatkan hasil bahwa kenaikan PDRB dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam periode tertentu (Hadi Sasana,2006). Meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan penerimaan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunannya. Kemudian akan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktifitas kinerjanya. Dari laju pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi titik keberhasilan otonomi daerah berupa pembangunan daerah yang telah

dicapai dan bermanfaat untuk menentukan keputusan dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi atau rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistic nasional. Berhasil atau tidaknya program-program di negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro 2000). Berikut adalah perkembangan PDRB dan Jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta :

Tabel 1.2

PDRB D.I Yogyakarta tahun 2011-2016

Provinsi	PDRB (miliar rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
D.I Yogyakarta	64679	68049	71702	75665	79516	83514	87768

Sumber : BPS DIY

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Miskin D.I Yogyakarta 2011-2016

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
D.I Yogyakarta	540.5	563.3	562.1	541.9	532.6	550.2	494.9

Sumber : BPS DIY

Berdasarkan pada tabel 1.2 dan tabel 1,3 diatas bahwa PDRB atas dasar harga konstan di provinsi D.I Yogyakarta pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini berarti juga bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi D.I Yogyakarta juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat pada setiap tahunnya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga jumlah kemiskinan tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan yang berkualitas dan terdistribusi secara menyeluruh pada setiap daerah. Namun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin bertambah dimana PDRB meningkat, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta sejumlah 532.600 jiwa dan bertambah pada tahun 2015 menjadi 550.200 jiwa.

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Upah Minimum. Upah Minimum adalah standar yang digunakan untuk memberikan upah kepada karyawan, pegawai atau buruh dalam lingkungan kerja. Mmenurut Undang-undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Ada dua unsur penting dari upah minimum yang pertama, Upah Permulaan yaitu upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali bekerja. Yang kedua, Jumlah upah minimum

haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu untuk sandang, pangan, dan keperluan rumah tangga (Sumarsono, 2003).

Menurut Adit Agus Prasetyo (2010), dalam jurnalnya tentang pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Dimana dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa kenaikan upah minimum dapat menurunkan tingkat kemiskinan, hal ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum yang di sampaikan oleh Kaufman (2000) dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yaitu untuk mensejahterakan pekerja sehingga terbebas dari kemiskinan.

Upah sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sasaran dari kebijakan upah minimum adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Kebijakan upah minimum adalah untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktifitas pekerja, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara produksi yang lebih efisien. Oleh karenanya diperlukan adanya penetapan upah minimum oleh pemerintah dengan disesuaikan oleh kondisi perekonomian yang ada didaerah tersebut, maka upah minimum berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya.

Perkembangan Upah Minimum setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Upah minimum Kabupaten/Kota mulai tahun 2013 ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota dimana pada tahun 2011 Upah Minimum semua Kabupaten/kota sama yaitu sebesar 808.000 rupiah, dan untuk tahun 2012 sebesar 892.660 rupiah. Urutan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari terbesar sampai terkecil selama 4 tahun yaitu tahun 2013-2016 yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul. Kemudian untuk Upah Minimum Provinsi (UMK) diambil dari nilai upah minimum Kabupaten/Kota terendah di Provinsi D.I Yogyakarta yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Gunung Kidul.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan primer yang seharusnya wajib bagi masyarakat, dengan pendidikan yang tinggi maka seseorang akan mempunyai ilmu sebagai modal penting saat masuk dunia kerja. Hal ini sudah diatur dalam UUD 1995 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (ayat 1), menegaskan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional (ayat 2). Kemudian lahir UU No 20 tahun 2003 sebagai penyempurna UUD 45 psal 31 ayat 1 dan 2. Dengan adanya pendidikan maka akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berkualitas, dimana saat ini semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang menjadikan persaingan dalam dunia kerja.

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka dalam sisi ketrampilan, keahlian dan pengetahuan juga meningkat sehingga mendorong produktivitas individu tersebut. Dikutip dari Kumalasari (2011), perusahaan akan memperkerjakan tenaga kerja yang memiliki produktifitas tinggi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi dan memberikan upah tinggi kepada pekerja yang berproduktivitas tinggi. Sehingga seseorang yang memiliki produktivitas tinggi akan memperoleh kesejahteraan dan terhindar dari kemiskinan.

Berikut adalah pendidikan di provinsi DIY yang diambil dari jumlah rata-rata lama sekolah :

Tabel 1.4

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) D.I Yogyakarta 2011-2016

Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
D.I Yogyakarta	8.51	8.53	8.63	8.72	8.84	9.00	9.12

Sumber : BPS DIY

Dari tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa RLS provinsi D.I Yogyakarta dari tahun 2010-2016 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 RLS D.I Yogyakarta tercatat sebesar 8.51 tahun yang berarti setara dengan kelas 8 sekolah menengah pertama. Kemudian pada tahun 2016 RLS tercatat sebesar

9.12 tahun atau setara dengan kelulusan untuk jenjang sekolah menengah atas. Dimana selama rentang waktu 7 tahun pendidikan di D.I Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup baik.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, di provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2010-2016 terjadi penurunan tingkat kemiskinan, namun rata-rata tingkat kemiskinannya masih terbilang tinggi dibanding provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Sehingga melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), UPAH MINIMUM DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2010-2016”

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dengan menurunkan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Pendidikan.
2. Penelitian ini dilakukan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi lima Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta.

3. Penelitian ini hanya meneliti dari tahun 2010-2016.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2010-2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2010-2016.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2010-2016.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Agar memperoleh pengetahuan lebih mendalam dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat semasa kuliah khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan.

2. Bagi mahasiswa/akademisi

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis.

3. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah DIY dalam menentukan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang ekonomi pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.